

## FENOMENA POKOK PENDIDIKAN INDONESIA: APA DAN BAGAIMANA?

**I Wayan Dana Ardika**

Jurusan Teknik Sipil, Politeknik Negeri Bali

E-mail: [iwayanfund@yahoo.com](mailto:iwayanfund@yahoo.com)

**A.A. Raka Sitawati**

**Ni Ketut Suciani**

Jurusan Administrasi Niaga, Politeknik Negeri Bali

Kampus Bukit Jimbaran, Bali. Telp. +62-361-701981 ext. 138, 188

E-mail: [iwayanfund@gmail.com](mailto:iwayanfund@gmail.com); [ketutsuciani@yahoo.com](mailto:ketutsuciani@yahoo.com)

**ABSTRACT.** *The development of education is one priority in the national development agenda. The development of education is very important because it shows significant role in achieving progress in many aspects of life; such as social, economic, political, and cultural. Therefore, the Government is obliged to fulfill the right of every citizen in obtaining educational services to improve the quality of life of the Indonesian people as mandated by the 1945 Constitution, which requires that the government is responsible for creating the intellectual life of the nation and the general welfare. Having enjoyed a dozen years of education in Indonesia makes us feel sad and less satisfied. Assessments were done more based on results-oriented, not by process. Guidance to the students often ignore EQ (Emotional Quotient) and SQ (Spiritual Quotient), education practitioners only emphasizes the IQ (Intellectual Quotient). In this paper presented three central issues: i) improving quality, ii) equity of access, and iii) the efficiency of the education budget. The research analyzed by descriptive qualitative. There are still many things that must be addressed related to the national education system. Educational equity that is currently lacking a well realized. The problem is because education itself is oriented in urban areas and the subsidy from the government that was still not enough for students. The effort of the government in conducting educational equity for poor and remote areas in Indonesia is not enough with the 9-year compulsory education program and the procurement of information technology such as television, radio, and internet.*

**KEYWORDS:** *Education in Indonesia, Intellectual Quotion, Emotional Quotions, Spiritual Quotion.*

### PENDAHULUAN

Seperti yang kita ketahui bersama, pembangunan pendidikan merupakan salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional. Pembangunan pendidikan sangat penting karena perannya yang signifikan dalam mencapai kemajuan di berbagai bidang kehidupan: sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Karena itu, Pemerintah berkewajiban untuk memenuhi hak setiap warga negara dalam memperoleh layanan pendidikan guna meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945, yang mewajibkan Pemerintah bertanggung jawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan kesejahteraan umum. Pendidikan menjadi landasan kuat yang diperlukan untuk meraih kemajuan bangsa di masa depan, bahkan

Pemerintah berkewajiban untuk memenuhi hak setiap warga negara dalam memperoleh layanan pendidikan guna meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 lebih penting lagi sebagai bekal dalam menghadapi era global yang sarat dengan persaingan antarbangsa yang berlangsung sangat ketat. Dengan demikian, pendidikan menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi karena ia merupakan faktor determinan bagi suatu bangsa untuk bisa memenangi kompetisi global.

Menikmati pendidikan belasan tahun di Indonesia membuat kita merasa miris dan kurang puas. Penilaian lebih banyak berorientasi hasil, bukan proses (sentralisasi Ujian Nasional sebagai patokan kelulusan siswa misalnya). Pembinaan terhadap para siswa seringkali mengabaikan EQ (*Emotional Quotient*) dan SQ (*Spiritual Quotient*), praktisi pendidikan hanya menekankan pada IQ (*Intellectual Quotient*). Isinya hafalan, cara cepat membabat soal, dan “ilmu” yang ketika diingat malah makin membuat lupa, tanpa penekanan soal pemikiran kritis dan pembentukan sikap mental positif. Gardner, dalam Suparno (1999: 5) menyatakan bahwa ada banyak orang yang IQ-nya tinggi, tetapi gagal dalam hidup. Trilogi dasar aspek pendidikan *kognitif-psikomotor-afektif* seringkali diabaikan.

Setiap diadakannya pemilihan umum (pemilihan Presiden) atau pemilihan kepala daerah, pendidikan selalu menjadi salah satu tema yang paling digemari dalam orasi politik, entah dengan menggratiskan atau memberikan beasiswa pendidikan. Sayang, mereka tampaknya tidak menyentuh problem mendasar pendidikan, bahkan pemahaman mereka atas isu pendidikan terkesan kurang mendalam. Mereka terjebak jargon-jargon populis dan retorika politik tanpa substansi. Padahal, seyogianya mereka mendiskusikan isu-isu mutakhir yang lebih bersifat fundamental. Banyak isu kritis yang patut menjadi tema kajian. Dalam makalah ini disajikan tiga isu sentral: i) peningkatan mutu, ii) pemerataan akses, dan iii) efisiensi anggaran, yang dikaji dalam uraian di bawah.

### ***METODE PENELITIAN***

Hatch dan Farhaday (dalam Larsen-Freeman dan Michael Long, 1991) memberikan definisi penelitian. Mereka mengatakan bahwa penelitian tersebut adalah salah satu pendekatan yang sistematis untuk menemukan jawaban-jawaban dari berbagai pertanyaan yang ada. Salah satu bagian yang membuatnya menjadi sistematis dikarenakan penelitian adalah suatu disain yang disusun secara matang (*a well-planned research design*) oleh peneliti itu sendiri.

Dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian, skema atau program penelitian berisi uraian (*outline*) tentang apa yang harus dilakukan oleh peneliti, mulai dari pertanyaan dalam mengeksplorasi data sampai pada analisis data akhirnya. Dalam penelitian-penelitian sosial, peneliti sering ingin memperoleh gambaran tentang suatu kondisi atau karakteristik tertentu. Untuk memenuhi maksud tersebut, maka yang paling tepat dilakukan oleh peneliti adalah melakukan penelitian observasi (Gall & Borg, 2003). Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode observasi. Observasi dilakukan dengan mengadakan pengamatan-pengamatan terhadap kondisi pendidikan terkini di Indonesia. Penulis juga melakukan observasi dan menganalisis berbagai bahan yang ditemukan di media cetak maupun elektronik. Untuk hasil analisis data, penulis memakai analisis deskriptif kualitatif karena memungkinkan penyajian data lebih riil dan jelas terhadap kondisi pendidikan di Indonesia.

### ***HASIL DAN PEMBAHASAN***

#### ***Peningkatan Mutu Pendidikan***

Dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, mutu pendidikan di Indonesia masih rendah, seperti dilaporkan Human Development Index (HDI). Laporan HDI tahun 2003 menunjukkan, Indonesia pada urutan ke-112 (0,682) dari 175 negara. Posisi ini jauh di bawah Singapura yang ada di posisi ke-28 (0,888), Brunei Darussalam ke-31 (0,872), Malaysia ke-58 (0,790), Thailand ke-74 (0,768), dan Filipina ke-85 (0,751). Meski laporan HDI bukan hanya mengukur status pendidikan (tetapi juga ekonomi dan kesehatan), namun ia merupakan dokumen rujukan yang valid guna melihat tingkat kemajuan pembangunan pendidikan di suatu negara. Data laporan UNESCO pada tahun 2011-pun hanya memeringkatkan Indonesia pada level pendidikan menengah, Jepang, Inggris, dan Norwegia berada pada level atas tertinggi (Hardjanti, 2012). Adapun kalau kita bicara isu mutu pendidikan, maka kita bicara hal yang terkait pada (i) kualitas guru dan tenaga kependidikan (kepala sekolah, pengawas, penilik), (ii) kurikulum pengajaran, (iii) metode pembelajaran, (iv) bahan ajar, (v) alat bantu pembelajaran, dan (vi) manajemen sekolah (Alhumami, 2009). Keenam elemen ini saling berkait dalam upaya meningkatkan kualitas belajar-mengajar, yang berpuncak pada peningkatan mutu pendidikan.

Namun, guru tetap merupakan faktor determinan dalam menentukan tinggi-rendahnya mutu pendidikan. Jumlah total guru sekitar 2,4 juta orang, banyak Guru masih berlatar belakang pendidikan SLTA dan D3 untuk jenjang TK-SD-SMP, dan sebagian kecil tamatan S1 untuk

jenjang sekolah menengah. Tentu saja ini berpengaruh pada kemampuan mengajar, yang diukur dengan penguasaan materi pelajaran dan metodologi pengajaran.

Selain itu, banyak guru yang mengajar di luar bidang keahliannya, yang secara teknis disebut mismatch. Contoh ekstrem, guru sejarah mengajar matematika dan IPA, yang terutama banyak dijumpai di madrasah (MI, MTs, MA). Guru mismatch ini jelas tidak mempunyai kompetensi untuk mengajar mata pelajaran yang bukan bidang keahliannya sehingga dapat menurunkan mutu aktivitas pembelajaran. Dengan demikian, upaya peningkatan mutu guru mutlak dilakukan yang bisa ditempuh melalui program sertifikasi dan penyetaraan D3 dan S1 menurut bidang studi yang relevan. Namun, upaya ini harus disertai pula dengan peningkatan kesejahteraan guru melalui pemberian insentif. Ini sangat penting agar motivasi guru dalam mengajar makin kuat dan semangat pengabdian dalam menjalankan tugas mulia sebagai pendidik kian bergelora.

Diakui atau tidak, krisis multidimensional yang melanda negeri ini membuka mata kita terhadap mutu pendidikan manusia Indonesia. Pun dengan sumber daya manusia hasil pendidikan yang ada di negeri ini. Memang, penyebab krisis itu sendiri begitu kompleks. Namun tak dipungkiri bahwa penyebab utamanya adalah sumber daya manusia itu sendiri yang kurang bermutu. Jangan harap bicara soal profesionalisme, terkadang sikap manusia Indonesia yang paling merisaukan adalah seringnya bertindak tanpa moralitas. Dalam sebuah penelitian, diungkapkan bahwa produktivitas manusia Indonesia begitu rendah. Hal ini dikarenakan kurang percaya diri, kurang kompetitif, kurang kreatif dan sulit berprakarsa sendiri (=selfstarter, N Idrus CITD 1999). Tentunya, hal itu disebabkan oleh sistem pendidikan yang *top down*, dan yang tidak mengembangkan inovasi dan kreativitas (Izoruhai, 2006).

Dalam sebuah seminar yang bertajuk “Seminar Nasional Kualitas Pendidikan dalam Membangun Kualitas Bangsa” salah satu pembicaranya yakni Drs Engkoswara, M.Pd., dosen Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, menegaskan bahwa, memang dewasa ini, sepertinya pendidikan seakan mengalami kemajuan dengan pertumbuhan sarjana, pascasarjana hingga doktor di berbagai bidang dan munculnya gedung-gedung sekolah hingga perguruan tinggi yang cukup mewah. Sayangnya, hingga kini pendidikan tidak bisa diakses secara merata oleh penduduk Indonesia.

Seiring dengan itu, tokoh cendekiawan muslim, Nurcholis Madjid mengakui bahwa, di Amerika, Jepang dan negara-negara lain baik di Asia dan Eropa, perkembangan pendidikan hampir merata. Sebab, anggaran yang dialokasikan ke pendidikan besar dan berjalan lancar.

Tentu saja, pendapat ini tidak begitu saja dilontarkan. Menurutnya, paling tidak 65% penduduk Indonesia berpendidikan SD, bahkan tidak tamat. Selain itu kualitas pendidikan di negara ini juga dinilai masih rendah bila dibandingkan dengan negara lain. Tak heran jika Indonesia hanya menempati urutan 102 dari 107 negara di dunia dan urutan 41 dari 47 negara di Asia.

Cak Nur –panggilan akrab sang profesor— menegaskan dalam laporan statistik, penyandang gelar doktor (S3) di Indonesia sangat rendah. Dari satu juta penduduknya, yang bergelar S3 (diraih secara prosedur) hanya 65 orang. Amerika dari satu juta penduduknya, 6.500 orang bergelar S3, Israel 16.500, Perancis 5000, German 4.000, India 1.300 orang. Semua itu hasil dari pendidikan yang bermutu. Bolehlah kita berkaca pada Korea Selatan. Negara ini memberikan prioritas untuk majukan pendidikan. Pengadaan sandang, pangan dan papan perlu tapi pembangunan pendidikan jangan sampai dianaktirikan. Kemajuan sebuah negara sangat ditentukan tingkat pendidikan sumber daya manusianya. Contoh lainnya, Malaysia yang pada tahun 1970-an, masih mengimpor tenaga pengajar dari Indonesia. Kini, pendidikan di Malaysia jauh di atas Indonesia. Mengapa? Pemerintahnya memberikan perhatian yang sangat serius. Tidak seperti di Indonesia, pendidikan kurang diperhatikan. Memang, tak dipungkiri kalau lulusan dari lembaga pendidikan di Indonesia kurang relevan dengan kebutuhan tenaga yang diperlukan, sehingga hasilnya kurang efektif dan mendorong terjadinya pengangguran intelektual. Permasalahan masih ditambah lagi dengan minimnya fasilitas pendidikan yang memadai.

Paling tidak, untuk mengatasi masalah ini, menurut Engkoswara ada dua hal yang harus dilakukan. Pertama adalah revitalisasi budaya bangsa. Artinya bangsa ini harus kembali berpedoman kepada Pembukaan UUD 1945, bahwa pendidikan adalah upaya utama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang berbudaya, yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki semangat juang yang tinggi dan memiliki kreativitas pribadi yang terpuji. Kedua, mengenai manajemen pendidikan. Sistem pendidikan nasional yang disempurnakan dan disahkan pada 2003, implementasinya harus dilakukan dengan manajemen atau pengelolaan yang proporsional dan profesional, baik di tingkat makro maupun di tingkat mikro.

Lebih pada pelaksanaannya, Fakry (dalam Izoruhai, 2006) mengajukan delapan poin paradigma pendidikan yang baru yakni *openess and flexibility in learning*, integrasi pendidikan ke dalam setiap aspek kehidupan manusia, responsif terhadap perubahan, *total learning*, *learning strategies*, *teacher-student roles in learning*, *ICT (information and communication technology) in learning process* serta *learning content and learning outcome*. Dengan delapan poin itu, paling tidak akan menjadi dasar agenda pendidikan ke depan yakni, pembahasan kurikulum, pembaruan

dalam proses pembelajaran, pembenahan manajemen pendidikan nasional, pembenahan pengelolaan guru dan mencari serta mengembangkan berbagai sumber alternatif pembiayaan pendidikan. Tentu saja semua itu tak lepas dari anggaran biaya. Dalam hal ini, anggaran pendidikan kudu memadai dan harus diupayakan secara sungguh-sungguh agar anggaran pendidikan negeri ini sekurang-kurangnya mencapai 20% dari APBN ataupun APBD. Dan yang paling penting adalah, lembaga pendidikan sebaiknya bebas pajak. Bahkan bila perlu ada pajak untuk pendidikan.

Fenomena lain mengenai pendidikan di Indonesia adalah adanya UN yang berawal dari PP 19/2005, yang menyatakan bahwa UN adalah indikator kelulusan. Namun banyak yang menilai UN tak bermanfaat karena hanya mengkondisikan penyelewengan, demi anak didik dan sekolah terangkat citranya. Guru, kepala sekolah, dan bahkan pejabat daerah terlibat jadi tim sukses. Passing grade ditetapkan, tapi sarana, prasarana, dan sumberdaya belum terkondisikan. Begitu hasil jeblok, segala cara agar murid lulus, bukan dengan introspeksi. *“We want to look good, but didn’t want to be really good”*. Sebagian menyayangkan jerih payah tiga tahun hanya ditentukan dalam tiga hari. Banyak murid cerdas diterima SPMB Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru, tapi gagal dalam UAN. Murid cerdas justru terbebani mentalnya. Apalagi, andaikata tak lulus, mereka musti mengulang Paket C yang prestisenya kalah jauh. Dorongan belajar pada akhirnya justru sulit dibangkitkan dan hasil maksimal mustahil diperoleh.

Di sisi lain, kualitas pendidikan memang sedemikian rendahnya. Dengan passing grade yang cukup rendah dibanding negara tetangga, masih banyak juga yang tidak lulus. Ketika ada wacana untuk menaikkan standar, protes di sana-sini. Bahkan ketika MA mengabulkan permohonan masyarakat untuk membatalkan pelaksanaan UN sampai pemerintah mampu menyediakan dan memfasilitasi pendidikan secara merata, tetapi pemerintah tetap bersikukuh untuk terus melanjutkan pelaksanaan UN tersebut. Nah solusinya? Mungkin kembalikan saja ke sistem Ebtanas lama yang dirasa lebih “fair” dan tidak mengundang banyak masalah, sembari menunggu format UN yang benar-benar pas buat negeri ini.

### ***Pemerataan Akses***

Pemerataan pendidikan merupakan isu paling kritis karena berkait erat dengan isu sensitif, yakni keadilan dalam memperoleh akses pendidikan. Memperoleh pendidikan yang layak merupakan hak asasi setiap warga bangsa yang dijamin konstitusi. Maka, pemerintah wajib

memberi pelayanan pendidikan yang baik kepada seluruh masyarakat. Keberhasilan pelayanan pendidikan dapat dilihat dari angka partisipasi siswa mengikuti pembelajaran di sekolah.

Menurut data Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2003, angka partisipasi murni (APM) pada jenjang SD, SMP, dan SMA berturut-turut adalah 92,6 persen, 63,5 persen, dan 40,6 persen. Menurut berita kompas.com tanggal 25 Maret 2012 mengungkapkan belum ada satupun daerah yang mampu mencapai APM 100% untuk jenjang pendidikan SMP. Khusus untuk jenjang SMP dan SMA diperparah dengan masih sedikitnya jumlah sekolah. Jadi dengan demikian dapat kita katakan bahwa meski APM pada jenjang SD sudah cukup tinggi, pada jenjang lanjutan (SMP dan SMA) angka yang dicapai masih rendah. Bila angka-angka itu dielaborasi berdasar kategori desa-kota, status sosial-ekonomi (kaya-miskin), dan provinsi (Jawa-luar Jawa), akan ditemukan fakta disparitas yang amat mencolok. Sebagai contoh, APM pada jenjang SLTP dan SLTA di perkotaan, masing-masing mencapai 71,9 persen dan 56,1 persen; sementara di pedesaan baru mencapai 54,1 persen dan 28,7 persen.

Juga ada perbedaan amat signifikan APM SLTP pada kelompok masyarakat kaya dan miskin, masing-masing 72,3 persen dan 49,9 persen. Fakta disparitas ini juga dijumpai di provinsi-provinsi Jawa-luar Jawa. APM SLTP di DI Yogyakarta 78 persen, sementara di Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Bangka-Belitung, Papua, dan Gorontalo kurang dari 50 persen. Bahkan di NTT masih di bawah 40 persen. Kenyataan disparitas itulah bisa menjadi justifikasi guna melakukan ekspansi program pendidikan secara lebih merata. Untuk itu, agenda penting yang harus menjadi prioritas adalah peningkatan pemerataan pendidikan, terutama bagi kelompok masyarakat miskin yang berjumlah sekitar 38,4 juta atau 17,6 persen dari total penduduk. Problem mereka, kemiskinan menjadi hambatan utama dalam mendapatkan akses pendidikan. Selain itu, daerah-daerah di luar Jawa yang masih tertinggal juga harus mendapat perhatian guna mencegah munculnya kecemburuan sosial. Dalam konteks ini, kebijakan affirmative action amat relevan diterapkan guna mengatasi kesenjangan partisipasi pendidikan antardaerah dan antarkelompok masyarakat.

Era global ditandai dengan pertumbuhan dan perkembangan industri, kompetisi dalam semua aspek kehidupan ekonomi, serta perubahan kebutuhan yang cepat didorong oleh kemajuan ilmu dan teknologi. Untuk memenuhi perkembangan ilmu dan teknologi, diperlukan SDM yang berkualitas. Oleh karena itu, pendidikan di Indonesia perlu ditingkatkan hingga ke pelosok negeri dan bagi masyarakat menengah ke bawah. Mereka yang paling memerlukan layanan pendidikan dalam mengantisipasi persaingan global di samping penyandang buta huruf adalah masyarakat

miskin di tempat-tempat yang jauh dan tersebar. Guna mengatasi hal yang tidak mungkin diselenggarakan pendidikan konvensional atau tatap muka ini perlu ditempuh strategi yang memanfaatkan potensi dan kemajuan teknologi baru. Untuk itu, agenda penting yang harus menjadi prioritas adalah peningkatan pemerataan pendidikan, terutama bagi kelompok masyarakat miskin yang berjumlah sekitar 38,4 juta atau 17,6 persen dari total penduduk Indonesia (berdasarkan data Badan Pusat Statistik : 2007). Problem mereka, kemiskinan menjadi hambatan utama dalam mendapatkan akses pendidikan. Selain itu, daerah-daerah di luar Jawa yang masih tertinggal juga harus mendapat perhatian guna mencegah munculnya kecemburuan sosial.

Di Indonesia, yang paling memerlukan pendidikan adalah mereka yang berada di daerah miskin dan terpencil. Untuk mengatasi kebutuhan pendidikan bagi mereka adalah upaya penerapan cara non konvensional. Cara lain itu adalah memanfaatkan potensi, kemajuan serta keluwesan teknologi baru. Sekalipun teknologi baru seperti teknologi komunikasi, informasi dan adi-marga menawarkan pemerataan pendidikan dengan biaya yang relatif rendah, penggunaannya masih merupakan jurang pemisah antara 'yang kaya' dan 'yang miskin'. Di samping itu, sekalipun teknologi dapat menjangkau yang tak terjangkau serta dapat menghadirkan pendidikan kepada warga belajar, mereka yang terlupakan tetap dirugikan karena bukan hanya tetap buta teknologi tetapi tertinggal dalam hal ilmu pengetahuan. Mayoritas kaum miskin di Indonesia tinggal di tempat-tempat jauh yang terpencil. Mereka praktis kekurangan segalanya: fasilitas, alat-alat transportasi dan komunikasi di samping rendahnya pengetahuan mereka terhadap teknologi.

Bila pendidikan ingin menjangkau mereka yang kurang beruntung ini, bila perbaikan hidup masyarakat yang lebih banyak ini yang menjadi sasaran kita dengan menyediakan pendidikan yang lebih berkualitas; lebih efektif dan cepat, kondisi yang proporsional harus diciptakan dengan memobilisasi sumber-sumber lokal dan nasional. Ketimpangan pemerataan pendidikan juga terjadi antarwilayah geografis yaitu antara perkotaan dan perdesaan, serta antara kawasan timur Indonesia (KTI) dan kawasan barat Indonesia (KBI), dan antartingkat pendapatan penduduk ataupun antargender. Pemerataan pendidikan masyarakat miskin dan terpencil di Indonesia, dapat dibagi menjadi pemerataan pendidikan formal dan pemerataan pendidikan non formal.

#### *Pemerataan Pendidikan Formal*

Pada jenjang pendidikan formal, secara umum perluasan akses dan peningkatan pemerataan pendidikan masih menjadi masalah utama, terutama bagi masyarakat miskin maupun masyarakat di daerah terpencil. Pemerataan pendidikan formal terdiri dari pemerataan pendidikan di tingkat prasekolah, sekolah dasar, menengah, perguruan tinggi. Pendidikan prasekolah merupakan pendidikan pada anak usia dini, semisal : playgroup dan taman kanak-kanak. Pada daerah perkotaan pendidikan prasekolah secara formal sudah sering ditemukan, tetapi untuk daerah terpencil seperti di pedesaan, masih sangat jarang. Pendidikan sekolah dasar memang sudah cukup dirasakan pemerataannya di berbagai daerah, hal ini sejalan dengan program wajib belajar 9 tahun, tetapi mutu dari pendidikan tersebut masih sangat berbeda antara daerah perkotaan dengan pedesaan. Pada pendidikan menengah, saat ini banyak bermunculan sekolah-sekolah unggul. Dalam pelaksanaannya model sekolah ini hanya diperuntukkan untuk kalangan borjuis, elit, dan berduit yang ingin mempertahankan eksistensinya sebagai kalangan atas. Kalaupun ada peserta didik yang masuk ke sekolah dengan sistem subsidi silang itu hanya akal-akalan saja dari pihak sekolah untuk menghindari “image” di masyarakat sebagai sekolah mahal dan berkualitas, sekolah plus, sekolah unggulan, sekolah alam, sekolah terpadu, sekolah eksperimen (laboratorium), sekolah full day, dan label-label lain yang melekat pada sekolah yang diasumsikan dengan “unggul”. Untuk pendidikan tinggi persoalannya menyangkut pemerataan kesempatan dalam memperoleh pendidikan tinggi bagi warga negara dalam kelompok usia 19-24 tahun. Biaya yang diperlukan untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi memang sangat besar, sehingga hanya anak-anak yang berasal dari keluarga mampu saja yang memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan tinggi. Kebutuhan biaya baik langsung maupun tak langsung yang cukup besar inilah yang menyebabkan rendahnya partisipasi pendidikan pada jenjang perguruan tinggi. Selain itu, penyebaran geografis lembaga pendidikan tinggi unggulan di Indonesia juga tidak merata. Berbagai universitas terkemuka dipusatkan berada di pulau Jawa, sehingga masyarakat yang berada di pulau lain harus meninggalkan kampung halamannya demi melanjutkan pendidikan tinggi.

Kritik kini mulai bermunculan sewaktu pelaksanaan Badan Hukum Milik Negara (BHMN) bagi beberapa universitas dan institut, seperti: UI, UGM, USU, UPI, ITB, dan IPB. BHMN dinilai telah mengarah ke komersialisasi pendidikan, yang bertentangan dengan misi utama sebuah lembaga pendidikan tinggi. Untuk bisa kuliah di universitas dan institut terpadang itu, orangtua mahasiswa harus mengeluarkan uang puluhan juta rupiah. Ada beberapa argument yang menyebabkan muncul gerakan protes atas gejala komersialisasi pendidikan tinggi. Pertama,

pendidikan tinggi yang selama ini bersifat elitis akan semakin bertambah elitis. Perguruan tinggi bertarif mahal akan makin mengentalkan watak elitisme dan kian mereduksi jiwa egalitarianisme. Gejala ini jelas bertentangan dengan prinsip pemerataan pendidikan seperti diamanatkan di dalam UU Sistem Pendidikan Nasional. Prinsip dasar pemerataan ini sangat penting guna memberikan kesempatan bagi semua golongan masyarakat, untuk memperoleh pelayanan pendidikan yang baik. Kedua, ada alasan ideologis di balik gerakan protes itu. Selama ini, yang bisa menikmati pendidikan tinggi adalah orang-orang yang berasal dari keluarga kelas menengah. Bagi orang-orang yang berasal dari kelas bawah (keluarga miskin) mengalami kesulitan mendapatkan akses pendidikan tinggi dengan biaya yang mahal itu.

#### *Pemerataan Pendidikan Nonformal*

Di samping menghadapi permasalahan dalam meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan di jalur formal, pembangunan pendidikan juga menghadapi permasalahan dalam peningkatan akses dan pemerataan pendidikan non formal. Pada jalur pendidikan non formal juga menghadapi permasalahan dalam hal perluasan dan pemerataan akses pendidikan bagi setiap warga masyarakat. Sampai dengan tahun 2006, pendidikan non formal yang berfungsi baik sebagai transisi dari dunia sekolah ke dunia kerja (transition from school to work) maupun sebagai bentuk pendidikan sepanjang hayat belum dapat diakses secara luas oleh masyarakat. Pada saat yang sama, kesadaran masyarakat khususnya yang berusia dewasa untuk terus-menerus meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya masih sangat rendah. Apalagi pendidikan non formal, pada umumnya membutuhkan biaya yang cukup mahal sehingga tidak dapat terangkau oleh masyarakat menengah ke bawah.

#### *Efisiensi Anggaran*

Rendahnya alokasi anggaran pendidikan selalu mengemuka dalam perdebatan publik. Banyak pihak menuntut agar alokasi anggaran pendidikan dinaikkan guna mencapai tujuan (1) meningkatkan mutu dan (2) memperluas akses (pemerataan). Pemerintah telah memberi komitmen untuk meningkatkan anggaran pendidikan secara bertahap agar mencapai 20 persen dari APBN. Namun, kenaikan anggaran tidak akan berarti bila tidak disertai upaya efisiensi. Isu efisiensi menyangkut cara memanfaatkan dana yang ada untuk membiayai berbagai program dan jenis kegiatan dalam penyelenggaraan pendidikan. Kita harus mampu membuat skala prioritas

dan menentukan program utama agar sasaran yang telah ditetapkan bisa tercapai. Maka, disiplin dalam penggunaan anggaran menjadi amat penting guna menghindari penyaluran dana yang tidak sesuai peruntukannya. Hanya dengan disiplin anggaran yang dilakukan secara ketat, misalokasi dapat dicegah.

Memahami efisiensi anggaran harus diletakkan dalam konteks organisasi penyelenggara pendidikan. Struktur organisasi Departemen Pendidikan Nasional yang besar dengan jumlah personel amat banyak jelas menuntut pembiayaan yang besar pula. Untuk itu, hal penting yang patut diperhatikan adalah bagaimana beban biaya dalam mengoperasikan organisasi raksasa ini jangan sampai menyedot anggaran yang besar.

Biaya operasional organisasi pendidikan harus ditekan seminimal mungkin sehingga dana yang ada dapat disalurkan langsung ke pihak-pihak penerima yang berhak, yaitu sekolah/universitas dan siswa/mahasiswa. Bila anggaran pendidikan lebih banyak digunakan untuk mengongkosi organisasi, ini merupakan salah satu bentuk inefisiensi. Karena itu, tuntutan kenaikan anggaran pendidikan 20 persen harus diikuti upaya efisiensi, dengan menetapkan target dan sasaran secara benar dan mengevaluasi pos-pos anggaran yang menjadi sumber inefisiensi.

### ***SIMPULAN DAN SARAN***

Masih banyak hal yang harus dibenahi berkaitan dengan sistem pendidikan nasional. Pemerataan pendidikan yang ada saat ini masih kurang terealisasi dengan baik. Permasalahannya yaitu karena pendidikan itu sendiri masih berorientasi di wilayah perkotaan dan subsidi dari pemerintah itu pun masih belum mencukupi untuk masyarakat yang tidak mampu yang jumlahnya cukup besar.

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam melakukan pemerataan pendidikan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan di Indonesia yaitu dengan adanya program wajib belajar 9 tahun dan pengadaan teknologi informasi seperti televisi dan radio. Dengan masih banyaknya permasalahan-permasalahan yang belum dapat diselesaikan oleh pemerintah mengenai pendidikan di Indonesia, semestinya pembatalan pelaksanaan UN sesuai hasil peninjauan kembali ke MA dapat diperhatikan oleh pemerintah.

### DAFTAR PUSTAKA

- Alhumami, Amich. (2008). *Isu Pendidikan Kritis Indonesia*. <http://www.google.com>, diakses tanggal 20 Februari 2010.
- Angelo dan Cross. (1993). *Teaching without Learning is Just Talking*. [www.yahoo.com](http://www.yahoo.com).
- Bogdan, Robert C., Biklen, Sari K. (1982). *Qualitative Research for Education an Introduction to Theory and Methods*. USA: Allin and Bacon, Inc.
- Cresswell, John W. (1994). *Research Design Qualitative & Quantitative Approaches*. USA: Sage Publications, Inc.
- Dick, Walter & Carey, Lou. (1985). *The systematic Design of Instruction*. USA: Scott, Foresman and Company.
- Ertmer, P.A., & Newby, T. J. (1993). *Behaviorm, Cognitivism, Constructivism*. Performance Improvement Quarterly, 6, 50-72.
- Fraenkel, Jack. R., & Wallen, Norman E. (1993). *How to Design and Evaluate Research in Education*. Second Edition. New York: McGraw-Hill, Inc.
- Furchan, Arief. H. (2005). *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gagne, Robert M., Briggs, Leslie J., dan Wager, Walter W. (1992). *Principles of Instructional Design*. USA: Harcourt Brace Jovanovich.
- Gall, D., Gall, P., & Borg, R. (2003). *Educational Research an Introduction*. USA: Pearson Education, Inc.
- Hardjanti, Rani. (2012). *20 Negara dengan Tingkat Pendidikan Tertinggi di Dunia*. <http://www.okezone.com/read/2012>, diakses tanggal 24 Februari 2013.
- Izoruhai. (2006). *Menyoal Paradigma Pendidikan Indonesia*. <http://www.google.com>, diakses tanggal 5 Februari 2010.
- Jaya. (2009). *Kualitas Pendidikan Indonesia di Mata Dunia*. <http://www.google.com>, diakses tanggal 20 Februari 2010.
- Limon, M. (2001). *On the cognitive conflict as an instructional strategy for conceptual change: a critical appraisal*. Learning and Instruction 11.4–5: 357–80.
- Margono, S. (2003). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: P.T. Asdi Mahasatya.
- Mugny, D., Doise, W. (1978). *Socio-cognitive conflict and the structure of individual and collective performances*. European Journal of Social Psychology 8: 181–91.
- Pattiro. (2009). *Efisiensi Anggaran Untuk Pendidikan Gratis*. <http://www.google.com>, diakses tanggal 21 Februari 2010.
- Rukmorini, Regina. (2012). *Angka Partisipasi Kasar Untuk SMP Belum Capai 100%*. <http://www.detik.com>, diakses tanggal 25 Februari 2013.
- Suparno, Paul. (2004). *Teori Intelegensi Ganda dan Implementasinya di Sekolah*. Yogyakarta: Kanisius.
- T. Sulistyono, Drs. M.Pd.,MM. (2003). *Wawasan Pendidikan. Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional*.